

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RS Jiwa Grhasia DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan RS Jiwa Grhasia DIY :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset
 - 3.1.4 Kewajiban
 - 3.1.5 Ekuitas
 - 3.1.6 Pendapatan-LO
 - 3.1.7 Beban
 - 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN					
Urusan Pemerintahan	: BIDANG KESEHATAN				
Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.000 RS JIWA GRHASIA				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
5	BELANJA DAERAH	73.490.987.649,00	59.704.532.477,20	13.786.455.171,80	81,24
5.1	BELANJA OPERASI	72.018.354.249,00	58.307.889.248,20	13.710.465.000,80	80,96
5.1.01	Belanja Pegawai	46.059.618.038,00	44.689.007.789,00	1.370.610.249,00	97,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.958.736.211,00	13.618.881.459,20	12.339.854.751,80	52,46
5.2	BELANJA MODAL	1.472.633.400,00	1.396.643.229,00	75.990.171,00	94,84
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.633.400,00	1.280.131.670,00	70.501.730,00	94,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.000.000,00	116.511.559,00	5.488.441,00	95,50
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.490.987.649,00	59.704.532.477,20	13.786.455.171,80	81,24
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.508.406.759,00	39.169.876.305,00	1.338.530.454,00	96,70
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.508.406.759,00	39.169.876.305,00	1.338.530.454,00	96,70
5.1	BELANJA OPERASI	40.508.406.759,00	39.169.876.305,00	1.338.530.454,00	96,70
5.1.01	Belanja Pegawai	40.508.406.759,00	39.169.876.305,00	1.338.530.454,00	96,70
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.360.572.011,00	21.106.552.255,00	1.254.019.756,00	94,39
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	16.361.832.643,00	15.533.879.496,00	827.953.147,00	94,94
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	14.359.070.665,00	14.308.571.400,00	50.499.265,00	99,65
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.002.761.978,00	1.225.308.096,00	777.453.882,00	61,18
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.503.109.313,00	1.391.017.994,00	112.091.319,00	92,54
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.357.085.558,00	1.351.433.856,00	5.651.702,00	99,58
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	146.023.755,00	39.584.138,00	106.439.617,00	27,11
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	152.350.000,00	138.400.000,00	13.950.000,00	90,84
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	152.350.000,00	138.400.000,00	13.950.000,00	90,84
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.894.005.000,00	1.683.655.000,00	210.350.000,00	88,89
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.687.755.000,00	1.683.655.000,00	4.100.000,00	99,76
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	206.250.000,00		206.250.000,00	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.340.000,00	118.340.000,00	-	100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.340.000,00	118.340.000,00	-	100,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	939.504.660,00	858.901.200,00	80.603.460,00	91,42
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	822.039.420,00	821.604.900,00	434.520,00	99,95
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	117.465.240,00	37.296.300,00	80.168.940,00	31,75
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.989.923,00	34.981.340,00	8.583,00	99,98
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.989.923,00	34.981.340,00	8.583,00	99,98
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	232.339,00	218.420,00	13.919,00	94,01
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	204.660,00	204.364,00	296,00	99,86
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27.679,00	14.056,00	13.623,00	50,78
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.230.199.803,00	1.222.163.876,00	8.035.927,00	99,35
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.171.055.322,00	1.169.658.580,00	1.396.742,00	99,88
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	59.144.481,00	52.505.296,00	6.639.185,00	88,77
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.989.312,00	31.732.833,00	256.479,00	99,20
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	29.399.765,00	29.358.906,00	40.859,00	99,86
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.589.547,00	2.373.927,00	215.620,00	91,67
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	94.019.018,00	93.262.096,00	756.922,00	99,19
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	88.199.227,00	88.076.648,00	122.579,00	99,86
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.819.791,00	5.185.448,00	634.343,00	89,10
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.147.834.748,00	18.063.324.050,00	84.510.698,00	99,53
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.720.273.422,00	8.679.774.550,00	40.498.872,00	99,54
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.478.335.250,00	8.439.077.750,00	39.257.500,00	99,54
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	241.938.172,00	240.696.800,00	1.241.372,00	99,49
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.427.561.326,00	9.383.549.500,00	44.011.826,00	4.848,45
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.234.024.328,00	9.191.006.000,00	43.018.328,00	99,53
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	193.536.998,00	192.543.500,00	993.498,00	99,49
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	32.982.580.890,00	20.534.656.172,20	12.447.924.717,80	62,26
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32.982.580.890,00	20.534.656.172,20	12.447.924.717,80	62,26
5.1	BELANJA OPERASI	31.509.947.490,00	19.138.012.943,20	12.371.934.546,80	60,74
5.1.01	Belanja Pegawai	5.551.211.279,00	5.519.131.484,00	32.079.795,00	99,42
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.551.211.279,00	5.519.131.484,00	32.079.795,00	99,42
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.551.211.279,00	5.519.131.484,00	32.079.795,00	99,42
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.551.211.279,00	5.519.131.484,00	32.079.795,00	99,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.958.736.211,00	13.618.881.459,20	12.339.854.751,80	52,46
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.958.736.211,00	13.618.881.459,20	12.339.854.751,80	52,46
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.958.736.211,00	13.618.881.459,20	12.339.854.751,80	52,46
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.958.736.211,00	13.618.881.459,20	12.339.854.751,80	52,46
5.2	BELANJA MODAL	1.472.633.400,00	1.396.643.229,00	75.990.171,00	94,84
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.633.400,00	1.280.131.670,00	70.501.730,00	94,78
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.350.633.400,00	1.280.131.670,00	70.501.730,00	94,78
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.350.633.400,00	1.280.131.670,00	70.501.730,00	94,78
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.350.633.400,00	1.280.131.670,00	70.501.730,00	94,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.000.000,00	116.511.559,00	5.488.441,00	95,50
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	122.000.000,00	116.511.559,00	5.488.441,00	95,50
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	122.000.000,00	116.511.559,00	5.488.441,00	95,50
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	122.000.000,00	116.511.559,00	5.488.441,00	95,50
SURPLUS/DEFISIT		(55.136.085.649,00)	(40.001.376.212,31)	(12.438.200.906,91)	72,55

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di RS Jiwa Grhasia adalah jumlah pasien yang sifatnya fluktuatif. Jumlah pasien tersebut berbanding lurus terhadap pendapatan RS Jiwa Grhasia. Pendapatan tahun 2023 melampaui target sebesar Rp.1.348.254.264,89 atau sebesar 107,35% akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi pendapatan tahun ini jauh lebih rendah. Selain itu, juga dilakukan penataan kegiatan sehingga kegiatan yang dipandang tidak berpengaruh langsung terhadap pelayanan masyarakat dapat ditanggihkan untuk efisiensi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2023	2022 (Audited)
3.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp.19.703.156.264,89</u>	<u>Rp. 23.631.733.885,39</u>

Pendapatan-LRA RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.18.354.902.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 19.703.156.264,89 atau 107,35 % dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp. 19.703.156.264,89</u>	<u>Rp.23.631.733.885,39</u>
---	------------------------------	-----------------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.18.354.902.000,00 dan realisasi sebesar Rp.19.703.156.264,89 atau lebih target sebesar 7,35% dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%
		PENDAPATAN USAHA	18.354.902.000,00	19.703.156.264,89	1.348.254.264,89	107,35
I		PENDAPATAN JASA LAYANAN	17.351.797.000,00	18.603.235.912,25	1.251.438.912,25	107,21
	I.1	PENDAPATAN RAWAT JALAN	8.059.925.000,00	8.710.936.191,25	695.797.212,25	108,63
	1	Klinik Umum	15.000.000,00	2.800.000,00	(12.700.000,00)	18,06
	2	Klinik Jiwa dan Narkoba	5.083.145.000,00	5.854.337.882,00	771.192.882,00	117,17
	3	Klinik Gigi	77.850.000,00	66.650.700,00	(11.199.300,00)	85,61
	4	Klinik Syaraf	20.750.000,00	18.720.000,00	(2.030.000,00)	90,22
	5	Klinik Penyakit Dalam	6.450.000,00		(6.450.000,00)	0,00
	6	Klinik Anak	16.000,000,00	14.860.000,00	(1.140.000,00)	92,88
	7	Instalasi Rehab Medik	79.400.000,00	73.007.329,00	(6.392.671,00)	91,95
	8	Pelayanan Napza	120.200.000,00	116.634.564,00	(3.565.436,00)	97,03
	9	IPWL	4.690.000,00	4.558.790,00	(131.210,00)	97,20
	10	IGD	110.400.000,00	72.006.650,00	(38.393.350,00)	65,22
	11	Obat Rajal	1.863.540.000,00	1.783.024.008,25	(80.515.991,75)	95,68
	12	Klinik Psikologi	116.000.000,00	137.585.000,00	21.585.000,00	118,61
	13	Surat Keterangan Dokter	395.500.000,00	380.739.000,00	(14.761.000,00)	96,27
	14	DIPAM	150.500.000,00	186.012.268,00	35.512.268,00	123,60
	I.2	PENUNJANG	408.500.000,00	382.951.550,00	(25.548.450,00)	93,75
	1	Laboratorium	352.500.000,00	352.166.800,00	(333.200,00)	99,91
	2	Radiologi	56.000.000,00	30.784.750,00	(25.215.250,00)	54,97

	I.3	RAWAT INAP		8.883.372.000,00	9.509.348.171,00	625.976.171,00	107,05
		1	Perawatan Pasien	8.779.222.000,00	9.345.846.350,00	566.624.350,00	106,45
		2	IPWL	91.000.000,00	151.441.000,00	60.441.499,00	166,42
		3	Konsultasi Tenaga Ahli	2.150.000,00	2.081.000,00	(69.000,00)	96,79
		4	Obat Ranap	11.000.000,00	9.979.311,00	(1.020.678,00)	90,72
II	PENDAPATAN LAIN-LAIN			1.003.105.000,00	1.099.920.352,64	61.783.038,00	109,65
		1	Diklat	498.000.000,00	558.252.000,00	60.252.000,00	112,10
		2	Sewa Gedung Therapy	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	140,00
		3	Sewa Tempat Fotocopy	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00
		4	Sewa Kalandra	24.000.000,00	31.000.000,00	7.000.000,00	129,17
		5	Pemakaian Mobil, Bus dan Ambulance	1.140.000,00	1.759.000,00	619.000,00	154,30
		6	Legalisir	1.065.000,00	644.000,00	(421.000,00)	60,47
		7	Sewa Gedung Diklat	54.000.000,00	50.480.000,00	(3.520.000,00)	93,48
		8	Parkir	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	16,67
		9	Work Terapi/ Keterampilan Pasien	14.400.000,00	11.067.000,00	(3.333.000,00)	76,85
		10	Sewa Lapangan Sepakbola	7.000.000,00	9.800.000,00	2.800.000,00	140,00
		11	Sewa Tanah Pertanian	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00
		12	Pemulasaran Jenazah	5.400.000,00	0,00	0,00	
		13	Sewa Grhasia Inn	32.400.000,00	13.500.000,00	(18.900.000,00)	41,67
		14	Jasa Bank	319.500.000,00	330.580.314,64	11.080.314,64	103,47
		15	Lain-Lain	15.200.000,00	75.638.038,00	60.438.038,00	497,62

Keterangan :

- Pendapatan Rawat Jalan Secara keseluruhan melebihi target sebesar 8,63%, klinik jiwa dan narkoba melebihi target sebesar 15,17%, klinik psikologi juga melebihi target sebesar 18,61% dan pelayanan DIPAM melebihi target sebesar 23,60. Untuk pelayanan rawat jalan lainnya masih belum mencapai target.
- Pendapatan Rawat Inap melebihi target sebesar Rp. 625.976.171,00 atau sebesar 7,05%.
- Pendapatan dari Lain – lain pendapatan mengalami kenaikan pada pelayanan diklat sebesar 12,10%

3.1.2	Belanja	Rp. 59.704.532.477,20	Rp. 63.909.659.686,91
-------	----------------	------------------------------	------------------------------

Belanja RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.73.490.987.649,00 dengan realisasi sebesar Rp.59.704.532.477,20 atau 81,24 %. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1	Belanja Operasi	Rp.58.307.889.248,20	Rp.58.790.043.285,91
---------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Belanja Operasi RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.72.018.354.249,00 dan realisasi sebesar Rp. 58.307.889.248,20 atau 80,96%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1

Belanja Pegawai

Rp.44.689.007.789,00

Rp.45.091.128.714,64

Belanja Pegawai RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 46.059.618.038,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.689.007.789,00 atau sebesar 97,02% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Gaji dan Tunjangan ASN				
a.	Gaji Pokok ASN	Rp. 16.361.832.643,00	Rp. 15.533.879.496,00	94,94
b.	Tunjangan Keluarga	Rp. 1.503.109.313,00	Rp. 1.391.017.994,00	92,54
c.	Tunjangan Jabatan	Rp. 152.350.000,00	Rp. 138.400.000,00	90,84
d.	Tunjangan Fungsional	Rp. 1.894.005.000,00	Rp. 1.683.655.000,00	88,89
e.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 118.340.000,00	Rp. 118.340.000,00	100,00
f.	Tunjangan Beras	Rp. 939.504.660,00	Rp. 858.901.200,00	91,42
g.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp. 34.989.923,00	Rp. 34.981.340,00	99,98
h.	Pembulatan Gaji	Rp. 232.339,00	Rp. 218.420,00	94,01
i.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 1.230.199.803,00	Rp. 1.222.163.876,00	99,35
j.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 31.989.312,00	Rp. 31.732.833,00	99,20
k.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp. 94.019.018,00	Rp. 93.262.096,00	99,19
Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 8.720.273.422,00	Rp. 8.679.774.550,00	99,54
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp. 9.427.561.326,00	Rp. 9.383.549.500,00	99,53
Belanja Pegawai BLUD		Rp. 5.551.211.279,00	Rp. 5.519.131.484,00	99,42
	Jumlah	Rp 46.059.618.038,00	Rp 44.689.007.789,00	97,02

3.1.2.1.2

Belanja Barang dan Jasa

Rp.13.618.881.459,20

Rp.13.698.914.571,27

Belanja Barang dan Jasa RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.25.958.736.211,00 dan realisasi sebesar Rp.13.618.881.459,20 atau 52,46%, dengan rincian sebagai berikut:

18.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Rp. 6.550.000,00
19.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.740.000,00
20.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Rp. 10.750.000,00
21.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp. 12.500.000,00
22.	Belanja Modal Mebel	Rp. 20.400.000,00
23.	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp. 22.091.620,00
24.	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp. 26.173.800,00
25.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp. 27.017.500,00
26.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp. 28.860.00,00
27.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp. 35.700.000,00
28.	Belanja Modal Analytical Instrument	Rp. 36.000.000,00
29.	Belanja Modal Pompa	Rp. 40.075.000,00
30.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	Rp. 80.000.000,00
31.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp. 80.354.350,00
32.	Belanja Modal System	Rp. 131.812.500,00
33.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp. 195.000.000,00
34.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp. 197.635.500,00
35.	Belanja Modal Persoal Computer	Rp. 269.200.000,00
	Jumlah	Rp. 1.280.131.670,00

3.1.2.2.2

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp.116.511.559,00

Rp. 3.321.741.958,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sesuai RBA RSJ Grhasia dianggarkan sebesar Rp.122.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 116.511.559,00 atau 95,50%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan Gedung BLUD	Rp. 122.000.000,00	Rp. 116.511.559,00	95,50
	Jumlah	Rp. 122.000.000,00	Rp. 116.511.559,00	95.50

3.1.2.2.3

Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Rp.00,00

Rp.895.510.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 Rp. 0,00

3.1.3 Aset

Aset RSJ Grhasia per 31 Desember 2023 sebesar Rp.74.340.554.210,86 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.17.048.676.103,79 Aset Tetap sebesar Rp.55.284.782.437,07 dan Aset Lainnya sebesar Rp.2.007.095.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1

Aset Lancar

2023

2022

Rp.17.048.676.103,79

Rp. 17.508.377.313,83

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.048.676.103,79 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1Kas dan Setara KasRp.13.796.178.983,54Rp.14.627.678.890,85

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.13.796.178.983,54 terdiri dari Kas di BLUD sebesar Rp.13.796.178.983,54 yaitu merupakan saldo kas dari pendapatan jasa layanan.

Piutang Lain-lain PAD
3.1.3.1.2yang SahRp.2.187.891.334,00Rp.1.951.054.876,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.187.891.334,00 merupakan piutang lain-lain PAD yang sah – piutang BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Piutang	Jumlah
Piutang Pasien Umum	Rp. 658.334.060,00
Piutang Pasien Jamkes	Rp. 1.465.146.274,00
Piutang Diklat	Rp. 64.411.000,00
Jumlah	Rp. 2.187.891.334,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.2.187.891.334,00 terdiri dari Piutang Pasien umum, Piutang Pasien Jamkes, Piutang Diklat dan Piutang Oksigen Cair dengan kategori sebagai berikut:

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah
Belum jatuh tempo	Lancar	Rp. 1.478.586.670,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	Rp. 16.179.192,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	Rp. 15.975.251,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	Macet	Rp. 677.150.221,00
	Jumlah	Rp. 2.187.891.334,00

3.1.3.1.3Penyisihan PiutangRp. 694.148.699,05Rp. 835,167.501,00

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.694.148.699,05 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Prosentase	Jumlah Piutang		Jumlah Penyisihan Piutang	
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)	Rp.	1.478.586.670,00	Rp.	7.392.933,35
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)	Rp.	16.179.192,00	Rp.	1.617.919,20
Diragukan	50% (lima puluh persen)	Rp.	15.975.251,00	Rp.	7.987.625,50
Macet	100% (seratus persen)	Rp.	677.150.221,00	Rp.	677.150.221,00
Jumlah		Rp.	2.187.891.334,00	Rp.	694.148.699,05

Penyisihan Piutang Tahun ini berkurang sebesar Rp. 141.018.801,95 dikoreks dicatat sebagai pendapatan (Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO--Pendapatan Hibah--Sumbangan Pihak ke 3). Koreksi pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang sah-LO karena sebelumnya penyisihan piutang dari pelunasan piutang dikurangkan dari ekuitas.

3.1.3.1.4 Persediaan

Rp.1.700.410.478,74

Rp.1.711.827.714,65

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.700.410.478,74 dengan rincian sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2023
1.	Bahan Kimia	Rp. 181.083.826,34
2.	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 9.290.000,00
3.	Isi Tabung Gas	Rp. 0,00
4.	Bahan Lainnya	Rp. 0,00
5.	Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp. 450.408.734,70
6.	Suku Cadang Alat Laboratorium	Rp. 0,00
7.	Alat Tulis Kantor	Rp. 78.236.932,40
8.	Kertas dan Cover	Rp. 9.524.228,00
9.	Bahan Cetak	Rp. 8.488.084,00
10.	Benda Pos	Rp. 2.640.000,00
11.	Bahan Komputer	Rp. 7.753.650,00
12.	Perabot Kantor	Rp. 72.143.446,00
13.	Alat Listrik	Rp. 131.004.350,00,00
14.	Perlengkapan Dinas	Rp. 3.456.000,00
15.	Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya	Rp. 8.878.247,00
16.	Obat	Rp. 685.171.255,30
17.	Natura	Rp. 52.331.725,00
	Jumlah	Rp. 1.700.410.478,74

3.1.3.2 Aset Tetap

Rp.55.284.782.437,07

Rp. 56.643.049.229,38

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.55.284.782.437,07 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1 Tanah

Rp.150.000,00

Rp.150.000,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.150.000,00 berasal dari saldo awal setelah penyesuaian sebesar Rp.0,00 ditambah dengan hasil pengadaan Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1.	Tanah Perkampungan	Rp. 150.000,00
2.	Tanah Pertanian	Rp. 0,00
3.	Tanah Perkebunan	Rp. 0,00
4.	Kebun Campuran	Rp. 0,00
5.	Hutan	Rp. 0,00

6.	Kolam Ikan	Rp.	0,00
7.	Dana/Rawa	Rp.	0,00
8.	Tanah Tandus/Rusak	Rp.	0,00
9.	Alang-alang dan Padang Rumput	Rp.	0,00
10	Tanah Pengguna Lain	Rp.	0,00
11.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	Rp.	0,00
12.	Tanah Pertambangan	Rp.	0,00
13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	150.000,00

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin Rp.32.474.211.350,00 Rp. 31.615.312.030,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.32.474.211.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.858.899.320,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
 Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp.858.899.320,00 berasal dari :

Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	1.280.131.670,00
Kapitalisasi dari Belanja Modal dan Bangunan (Ruang Podcast – LHP Inspektorat)	Rp.	6.960.000,00
Kapitalisasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin	Rp.	10.400.300,00
Kapitalisasi dari Pemeliharaan ke Peralatan dan Mesin	Rp.	7.356.500,00
TOTAL	Rp.	1.304.848.470,00

- b. Mutasi Kurang
 Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp.445.949.150,00 berasal dari :

Reklas ke Aset Extracount	Rp.	8.607.300,00
Reklas ke Aset Tidak Berwujud - Software	Rp.	195.000.000,00
Reklas ke Persediaan	Rp.	204.790.550,00
Reklas ke Pemeliharaan		37.551.300,00
TOTAL	Rp.	445.949.150,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.32.474.211.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Alat Besar	Rp. 1.039.640.000,00
2	Alat Angkutan	Rp. 2.573.564.080,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 341.476.000,00
4	Alat Pertanian	Rp. 20.996.700,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 9.459.493.231,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. 674.391.203,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 11.309.760.798,00
8	Alat Laboratorium	Rp. 4.614.758.073,00
9	Komputer	Rp. 2.282.367.455,00

10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp.	49.395.000,00
11	Peralatan Olahraga	Rp.	108.368.810,00
	Jumlah	Rp.	32.474.211.350,00

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp.60.623.831.315,76 Rp.60.360.592.689,76

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.60.623.831.315,76 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah
 Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp.263.238.626,00 berasal dari :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	116.511.559,00
Kapitalisasi dari Jasa Pemeliharaan Bangunan dan Gedung	Rp.	153.687.067,00
TOTAL	Rp.	270.198.626,00

- b. Mutasi kurang
 Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp.6.960.000,00 yang merupakan reklasifikasi ke modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 6.960.000,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp60.623.831.315,76 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Bangunan Gedung Kantor	Rp. 9.237.400.357,00
2	Bangunan Gudang	Rp. 190.646.121,00
3	Bangunan Gedung Instalasi	Rp. 502.847.000,00
4	Bangunan Kesehatan	Rp. 43.203.899.522,76
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp. 160.910.426,00
6	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp. 1.664.452.300,00
7	Banguanan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Rp. 198.000.000,00
8	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp. 22.489.541,00
9	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp. 346.590.205,00
10	Bangunan Fasilitas Umum	Rp. 49.289.500,00
11	Asrama	Rp. 4.478.149.950,00
12	Tugu/Tanda Batas Administrasi	Rp. 408.684.393,00
13	Pagar	Rp. 160.472.000,00
	Jumlah	Rp. 60.623.831.315,76

3.1.3.2.4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp.3.896.653.676,00

Rp.3.249.485.676,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah
- Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.647.168.000,00 berasal dari kapitalisasi aset rusak yang pernah diusulkan untuk di hapuskan tahun 2015 karena akan di hibahkan ke Lapas Narkoba maka dimasukkan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.
- b. Mutasi kurang
- Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 0,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.896.653.676,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Jalan dan Jembatan	Rp. 251.669.629,00
2	Bangunan Air	Rp. 2.466.617.939,00
3	Instalasi	Rp. 710.317.000,00
4	Jaringan	Rp. 401.549.108,00
	Jumlah	Rp. 3.896.653.676,00

3.1.3.2.5

Aset Tetap Lainnya

Rp.196.620.130,00

Rp.223.392.560,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.196.620.130,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
- Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00
- b. Mutasi kurang
- Mutasi kurang Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 26.772.430,00 merupakan usulan penghapusan aset tetap
- c. Penerimaan hibah
- Penerimaan hibah sebesar Rp.0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.196.620.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Buku Perpustakaan	Rp. 97.700.130,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp. 80.920.000,00
3	Tanaman	Rp. 18.000.000,00
	Jumlah	Rp. 196.620.130,00

3.1.3.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp.688.553.500,00

Rp.290.785.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat penambahan sebesar Rp. 397.768.500,00 merupakan Kapitalisasi dari Jasa Konsultasi DED Gd Manajemen dan Psikiatri Terpadu sebesar Rp. 397.768.500,00

3.1.3.2.7

Akumulasi Penyusutan

Rp.42.595.237.534,69

Rp. 39.096.668.726,38

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.42.595.237.534,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 27.875.847.510,04
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 13.052.264.695,67
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 1.602.875.995,68
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp. 64.249.333,30
	Jumlah	Rp. 42.595.237.534,69

3.1.3.3

Aset Lainnya

Rp.2.007.095.670,00

Rp.2.249.858.928,97

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.007.095.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.1

Aset Tak Berwujud

Rp.1.999.784.670,00

Rp.1.804.784.670,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp. 195.000.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
- Mutasi tambah sebesar Rp. 195.000.000,00 dari kapitalisasi belanja peralatan dan mesin
- b. Mutasi kurang
- Mutasi kurang sebesar 0,00
- c. Penerimaan hibah
- Penerimaan hibah sebesar Rp.0,00

3.1.3.3.2

Aset Lain-lain

Rp.79.730.723,00

Rp.445.074.258,97

Saldo Aset Lain –lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.79.730.723,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
- Mutasi tambah Aset lain-lain sebesar Rp.1.171.509.165,03 merupakan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain.
- b. Mutasi kurang
- Mutasi kurang Aset lain-lain sebesar Rp.1.536.852.701,00 merupakan penghapusan aset SK 47/SK/VII/2023 sebesar Rp.889.684.701,00 dan reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 647.168.000,00 (saluran IPAL Lapas).

3.1.4

Kewajiban

Rp. 872.135.364,86

Rp. 466.995.187,63

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.872.135.364,86 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1

Kewajiban Jangka Pendek

Rp. 872.135.364,86

Rp. 466.995.187,63

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.872.135.364,86 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1

Pendapatan Diterima Dimuka

Rp.22.735.694,82

Rp. 17.500.000,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.735.694,82,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai pendapatan Diterima Dimuka
Pemanfaatan Aset Gedung Layanan dan Penunjang	24-10-2023 s.d 24-10-2024	Rp. 28.000.000,00	24-10-2023 s.d 31-12-2023	Rp. 22.735.694,82

3.1.4.1.2

Utang Belanja

Rp.849.399.670,04

Rp.449.495.187,63

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas layanan barang atau jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Pegawai	Rp. 425.000.000,00
	Jasa Pelayanan BLUD Rp. 425.000.000,00	
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa :	Rp. 424.399.670,04
	Listrik Rp. 44.675.780,00	
	Air Rp. 3.407.250,00	
	Telepon Rp. 306.086,00	
	Internet Rp. 413.200,00	
	Obat Rp. 370.397.354,04	
	Suku Cadang Alat Kedokteran Rp. 5.200.000,00	
Jumlah		Rp. 849.399.670,04

3.1.5

Ekuitas

Rp.73.468.418.846,00

Rp.75.934.290.284,55

Saldo Ekuitas sebesar Rp.73.468.418.846,00 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	Rp. 75.934.290.284,55
	Surplus Defisit – LO	Rp. (41.776.766.545,50)
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	Rp. 39.169.876.305,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. 141.018.801,95
	Jumlah	Rp. 73.468.418.846,00

3.1.6

Pendapatan-LO

2023

Rp.19.934.757.028,07

Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp.19.934.757.028,07 meliputi Pendapatan dari pengelolaan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1

Pendapatan dari Jasa Layanan BLUD LO

Rp.19.934.757.028,07

Realisasi Pendapatan dan Pengelolaan BLUD-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp.19.934.757.028,07 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian			2023
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD tahun 2023			Rp. 19.934.757.028,07
a.	Pendapatan dari jasa layanan	Rp. 19.703.156.264,89	
b.	Piutang yang belum terbayar	Rp. 236.836.458,00	
c.	Pendapatan diterima di muka	Rp. (5.235.695,00)	

3.1.7

Beban

2023

Rp.61.651.467.884,60

Realisasi Beban RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.61.651.467.884,60 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1

Beban Operasi

Rp.58.395.587.076,29

Realisasi Beban Operasi RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.58.395.587.076,29 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 44.736.454.009,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.13.659.133.067,29 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1

Beban Pegawai

Rp.44.736.454.009,00

Realisasi Beban Pegawai RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.44.736.454.009,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 44.736.454.009,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	Rp. 15.533.879.496,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 1.391.017.994,00

	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 138.400.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	Rp. 1.678.845.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 118.340.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	Rp. 858.901.200,00
	g. Beban Tunjangan PPh	Rp. 34.981.340,00
	h. Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp. 218.420,00
	i. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 1.222.163.876,00
	j. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 31.732.833,00
	k. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp. 93.262.096,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan	Rp. 18.063.324.050,00
	a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 8.679.774.550,00
	b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp. 0,00
	c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp. 9.983.549.500,00
3.	Beban Pegawai BLUD	Rp. 5.571.387.704,00
Jumlah Beban Pegawai		Rp. 44.736.454.009,00

3.1.7.1.2

Beban Barang dan Jasa

Rp.13.659.133.067,29

Realisasi Beban Barang dan Jasa RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.659.133.067,29 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Barang Pakai Habis	Rp. 7.178.596.177,52
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp. 8.607.300,00
3.	Beban Jasa Kantor	Rp. 4.227.834.810,00
4.	Beban Sewa Tanah Grhasia	Rp. 10.639.326,77
5.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 53.040.000,00
6.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 4.500.000,00
7.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp. 150.000,00
8.	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp. 369.022.950,00
9.	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Rp. 72.634.000,00
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 177.808.314,00
11.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 406.479.975,00
12.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 487.651.157,00
13.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 352.380.252,00
14.	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 309.788.805,00
	Jumlah	Rp. 13.659.133.067,29

3.1.7.1.3

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Rp.0,00

Tidak ada penambahan realisasi Beban Penyisihan piutang pendapatan BLUD

3.1.7.2

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp.3.255.880.808,31

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.255.880.808,31 dengan rincian sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keuangan RSJ Grhasia Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan RSJ Grhasia Tahun 2023 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran RSJ Grhasia Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSJ Grhasia untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2023
Direktur RSJ Grhasia DIY

dr. Akhmad Akhadi S, MPH
NIP. 19680714 200012 1 002